

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT**

NOMOR : 615/HK.01.00/K.PB/10/2023

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 090a/HK.01.01/K.PB/08/2022
TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PROVINSI
PAPUA BARAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyamaan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Negara Republik Indonesia perlu membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- b. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang telah dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022, memiliki potensi terjadinya Tindak Pidana Pemilu dalam setiap tahapannya, sehingga dipandang perlu untuk dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tentang Perubahan Kelima Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 090a/Hk.01.01/K.Pb/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Papua Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Pemilihan Umum;

- Memperhatikan
1.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 277/PP.00.00/K1/08/2022 tanggal 19 Agustus 2022 Perihal Pembentukan Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Tahun 2024;
2.

Surat Kejaksaan Tinggi Papua Barat Nomor: B-02/R.2.4/Es.1/01/2023 Tanggal 2 Januari 2023;
3.

Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Provinsi Papua Barat Nomor: Sprin/510/IX/HUK.6.6./2023/Ditreskrimum Tanggal 4 September 2023;
4.

Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 Tanggal 25 Agustus 2022 Perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilih

MEMUTUSKAN

- Menetapkan

:

KESATU

:

Perubahan Kelima Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 090a/Hk.01.01/K.Pb/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Papua Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA

:

Mengangkat dan menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lajur 2 (dua) lampiran keputusan ini sebagai pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Papua Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KETIGA

:

Dalam melaksanakan tugasnya Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Papua Barat bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat;
- KEEMPAT

:

Segala biaya yang dikeluarkan akibat dari keputusan ini dibebankan pada Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Pa-pua Barat Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Manokwari, 10 Oktober 2023

Ketua,



Elias Idie

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR : 615/HK.01.00/K.PB/10/2023 TENTANG PERUBAHAN KELIMA LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 090a/HK.01.01/K.PB/08/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PROVINSI PAPUA BARAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SUSUNAN
SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU BAWASLU
PROVINSI PAPUA BARAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	2	3	4
1.	Elias Idie, S.T	Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat	Penasehat
2.	Daniel Tahi Monang Silitonga, S.H., M.A	Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Papua Barat	Penasehat
3.	Dr. Harli Siregar, S.H., M.H	Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua Barat	Penasehat
4.	Nurlaila Muhammad	Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat (Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa)	Pembina
5.	Novia Jaya, S.H., M.M	Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Provinsi Papua Barat	Pembina
6.	Djasmaniar, S.H., M.H	Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua barat	Pembina
7.	Northbertus, S.P., M.Hum	Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Dta dan Informasi)	Ketua Koordinator
8.	Otto Woff, S.H	PS Kanit 2 Subdit 1 Ditreskrim Kepolisian Daerah Provinsi Papua Barat	Koordinator
9.	Gerei Sambine, S.H., M.H	Kasi TP Kamnegtibum/TPUL Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua Barat	Koordinator
10.	John Charles Imbiri, S.Hut	Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat (Koordinator Divisi Organisasi, Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan)	Anggota
11.	Menahen Julens Sabarofek, S.I.P	Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat (Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat)	Anggota
12.	Benediktus Wahon, S.Sos., M.M	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat	Anggota
13.	Fredrik F. Abidondifu, S.H	Kepala Bagian Hukum, Humas, dan Dta Informasi Bawaslu Provinsi Papua Barat	Anggota
14.	Sefnat Kareth, S.H	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Papua Barat	Anggota
15.	Erika Priscilia, S.H	Staf Bagian Hukum, Humas, dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Papua Barat	Anggota
16.	Suryono Achmat Djiwa, S.H	Staf Bagian Hukum, Humas, dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Papua Barat	Anggota

17.	Abdul Karim Noviandi, S.H	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Papua Barat	Anggota
18.	Zebriani Septiawanty, S.E	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Papua Barat	Anggota
19.	Ahmad Faisal, S.I.P	Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat	Anggota
20.	Robertus A. Pandiangan, SIK., M.H	Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Provinsi Papua Barat	Anggota
21.	Yuli Subagyo, S.H	PS Kanit 1 Subdit 2 Ditreskrimum Kepolisian Daerah Provinsi Papua Barat	Anggota
22.	Muhammad Fakrul, S.H	PS Kanit 1 Subdit 1 Ditreskrimum Kepolisian Daerah Provinsi Papua Barat	Anggota
23.	Sholikhul Hadi	PS Panit 3 Subdit IV Ditreskrimum Kepolisian Daerah Provinsi Papua Barat	Anggota
24.	La Anwar, S.H	BA Subdit 3 Ditreskrimum Polda Papua Barat	Anggota
25.	Jana Riswandi	BA Bagbinops Ditreskrimum Polda Papua Barat	Anggota
26.	Hogi Wahyu Setiawan, S.H., M.H	BA Subdit 1 Ditreskrimum Polda Papua Barat	Anggota
27.	Dodik Wibowo	BA Subdit 1 Ditreskrimum Polda Papua Barat	Anggota
28.	Sebastian Richardo Dave Renyut, S.Sos	BA Subdit 3 Ditreskrimum Polda Papua Barat	Anggota
29.	Purnama, S.H., M.H	Koordinator Pada Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua Barat	Anggota
30.	Joice E. Mariai, S.H., M.H	Kasi T.P Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua Barat	Anggota
31.	Billy A. Wuisan, S.H., M.H.	Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua Barat	Anggota
32.	Hendrik Siktebuan, S.H., M.H	Kasi Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Tinggi Papua Barat	Anggota
33.	Hadjat, S.H	Kasi Informasi Teknologi dan Produksi Intelijen Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua Barat	Anggota
34.	Yoseph Yordan Ayomi, S.H	Kasi T.P OHARDA Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua Barat	Anggota
35.	Frangky Ticoalu, S.H.	Kasi Penuntutan Pidmil Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua Barat	Anggota
36.	Benony Andryan Kombodo, S.H., M.H	Kasi Upaya Hukum dan Eksaminasi Pidmil Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua Barat	Anggota
37.	Elmin Y. Palyama, S.H	Kasi Pertimbangan Hukum pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Papua Barat	Anggota

Manokwari, 10 Oktober 2023

Ketua,



Elias Idie

